Wamendag: Sistem Resi Gudang Berpotensi Dukung Stabilitas Harga Pangan

Tanggal	: Jum'at , 23 April 2021
Media	: medanbisnisdaily.com
Halaman	: 1
Wartawan	: Istimewa
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Jerry Sambuaga *(Wakil Menteri Perdagangan)*, Sutriono Edi *(Staf Ahli Menteri Perdagangan)*, Artati Widiarti *(Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP)*, Roy N. Mandey *(Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo))*, Joko Sutopo *(Bupati Wonogiri)*, Yuddy Renaldi *(Direktur Utama Bank BJB)*, Cecep M. Wahyudin *(Presiden Direktur Perwiratama Group)*
Rubrik	: Industri & Perdagangan
Topik	: Sistem Resi Gudang

Wamendag: Sistem Resi Gudang Berpotensi Dukung Stabilitas Harga Pangan



Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga. *(Biro Humas Kemendag)*

Medanbisnisdaily.com-Medan. Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga, mengatakan bahwa sistem resi gudang (SRG) berpotensi menjadi instrumen dalam mendukung pengendalian ketersediaan stok dan stabilitas harga komoditas pangan. Sebab, SRG dapat menjadi alternatif instrumen dalam mendukung tata niaga dan distribusi.



Hal itu disampaikan Jerry saat membuka webinar bertema "Literasi Sistem Resi Gudang: Penguatan Efisiensi Rantai Pasok dan Stabilisasi Harga Komoditas Pangan", Kamis (22/4/2021) di Jakarta. Literasi SRG diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif yang dapat bermanfaat bagi pengembangan SRG ke depan.

Hadir dalam acara tersebut secara virtual Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar Sutriono Edi, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Artati Widiarti, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey, Bupati Wonogiri Joko Sutopo, Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi, dan Direktur PT Arwinda Perwira Utama Cecep M. Wahyudin. Sekitar 400 peserta dari pelaku usaha berbagai komoditas juga menghadiri webinar itu.

"SRG berpotensi menjadi bagian dari sistem logistik dan distribusi nasional. Sehingga, ke depan, diharapkan dapat dioptimalkan untuk mendukung pengendalian ketersediaan stok dan stabilitas harga komoditas pangan," ujarnya sebagaimana disampaikan dalam keterangan tertulis, Jumat (23/4/2021).

SRG juga bermanfaat sebagai alternatif untuk memperoleh pembiayaan komoditas yang kompetitif. Selain itu, SRG berfungsi sebagai instrumen tunda jual yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku UKM, khususnya petani dan nelayan. Manfaat lain SRG yaitu dapat menjembatani produsen komoditas dengan pasar; menyediakan informasi mengenai ketersediaan, sebaran, mutu dan nilai komoditas; memberikan kepercayaan dan keamanan dalam transaksi perdagangan; dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan komoditas yang kompetitif.

Saat ini, implementasi SRG di Indonesia semakin berkembang dan tersebar di beberapa daerah sentra penghasil komoditas, khususnya pertanian. "Pemanfaatan SRG untuk komoditas lain, seperti kopi dan rumput laut menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, pemanfaatan SRG untuk komoditas ikan juga telah diinisiasi di beberapa daerah sentra perikanan," jelasnya.

Jerry menuturkan, partisipasi pelaku usaha komoditas dalam memanfaatkan SRG semakin meningkat. Peningkatan tersebut berdampak langsung pada nilai pemanfaatan SRG dalam tiga tahun terakhir. Pada 2020, nilai transaksi SRG tercatat tumbuh mencapai Rp 191,2 miliar atau tumbuh sebesar 71,9%. Sementara itu, pembiayaan berbasis SRG pada 2020 juga mengalami peningkatan, yakni mencapai Rp 117,7 miliar atau meningkat 84,4%.

Hingga saat ini ada 20 komoditas yang dapat diresigudangkan, terdiri dari komoditas pertanian atau perkebunan, peternakan, kelautan atau perikanan, dan pertambangan.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Sidharta Utama menambahkan, beberapa kunci sukses dalam pengembangan SRG, yaitu dukungan pemerintah pusat dan daerah, pelaku/lembaga SRG yang mandiri dan profesional, kesiapan dan kelayakan infrastruktur, adanya kepastian jaringan pemasaran untuk komoditas dalam SRG, serta kelembagaan petani atau nelayan yang telah terbentuk kuat di sentra produksi/lokasi gudang.

"Dalam hal dukungan pemerintah, regulasi pemerintah mampu menjamin dan memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan bagi para pemangku kepentingan, serta mendorong tumbuhnya peluang dan iklim usaha yang sehat, khususnya bagi pelaku usaha di sektor logistik dan transportasi," ungkap Sidharta.